

BAB III

IKHTISAR PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN

3.1.1. Ikhtisar Realisasi Pencapaian Target Kinerja Keuangan Secara Umum

Sumber Pendapatan Dinas Koperasi UKM Provinsi Jawa Tengah pada tahun anggaran 2018 total target sebesar Rp. 750.000.000,- terdiri dari Pendapatan Asli Daerah (PAD), yaitu Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah dengan realisasi sebesar Rp. 753.624.540,- atau sebesar 100,48% dari target yang ditetapkan sehingga total pendapatan daerah pada Dinas Koperasi UKM Provinsi Jawa Tengah sebesar Rp.753.624.540,-

Anggaran Pos Belanja tahun anggaran 2018 adalah sebesar Rp.77.835.798.000,-, terdiri dari Belanja Tidak Langsung sebesar Rp.18.354.118.000,- dengan realisasi sebesar Rp. 17.948.818.628,- atau 94,88% dan Belanja Langsung sebesar Rp. 59.481.680.000,- dengan realisasi belanja Rp.55.899.930.898,- atau 93,98%. Secara keseluruhan realisasi belanja daerah untuk Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Jawa Tengah mencapai 94,88% atau sebesar Rp.73.848.749.526,- Proporsi terbesar realisasi belanja daerah untuk tahun anggaran 2018 adalah untuk belanja barang jasa sebesar 77,66% atau Rp. 46.193.353.898,- dari belanja langsung.

. Secara rinci proporsi realisasi belanja pegawai untuk tahun anggaran 2018 adalah sebesar Rp. 5.064.675.000,- atau 5,25% dari total realisasi belanja langsung. Belanja barang jasa sebesar Rp. 46.193.353.898,- atau 90,08% dari total realisasi belanja langsung. Untuk belanja barang jasa barang yang dihibahkan kepada masyarakat tahun 2018 adalah sebesar Rp. 67.500.000,- sedangkan untuk realisasi untuk belanja modal tahun anggaran 2018 adalah sebesar Rp.4.641.902.000,- atau 10,05% dari total realisasi belanja langsung. Belanja modal yaitu berupa: pengadaan alat-alat bantu, pengadaan alat kantor, pengadaan alat rumah tangga, pengadaan komputer, perlengkapan kantor, pengadaan bangunan, pengadaan aset lainnya, alat-alat studio dan aset tak berwujud.

3.1.2. Hambatan dan Kendala yang Ada Dalam Pencapaian Target yang Telah Ditetapkan

Meskipun secara keseluruhan realisasi pendapatan dan pengelolaan belanja daerah telah memenuhi target namun masih terdapat potensi yang masih bisa dioptimalkan pencapaian kinerja.

Beberapa permasalahan yang dapat diidentifikasi terkait hal-hal tersebut di atas antara lain:

- ✓ Retribusi pemakaian kekayaan daerah antara lain sewa gedung/ruangan/aula dan asrama milik Pemerintah Daerah belum maksimal.
- ✓ Lemahnya kualitas kelembagaan Koperasi dan UKM meliputi manajemen, organisasi dan tatalaksana.
- ✓ Lemahnya Koperasi dan UKM terhadap akses pasar.
- ✓ Lemahnya akses Koperasi dan UKM terhadap sumber permodalan dan pembiayaan usaha.
- ✓ Lemahnya Koperasi dan UKM terhadap penguasaan teknologi dan pemenuhan sarana dan prasarana usaha.
- ✓ Rendahnya kualitas SDM Koperasi dan UKM yang meliputi kompetensi semangat dan jiwa kewirausahaan.

Beberapa langkah solusi untuk menghadapi permasalahan tersebut diatas antara lain :

- ✓ Dimaksimalkan tingkat hunian gedung/ruangan/aula dan asrama, disamping meningkatkan PAD juga adanya efisiensi anggaran.
- ✓ Penguatan Kapasitas Kelembagaan KUKM.
- ✓ Pemberdayaan Koperasi dan UKM melalui penguatan dan pengembangan Diversifikasi Usaha dan sistem distribusi/jaringan usaha serta peningkatan daya saing.
- ✓ Penguatan dan pengembangan permodalan dan jaringan kemitraan usaha KSP/USP-Kop.
- ✓ Pemberdayaan KUKM melalui peningkatan produktivitas, pemasaran dan jaringan usaha.
- ✓ Pemberdayaan KUKM melalui peningkatan produktivitas, pemasaran dan jaringan usaha.
- ✓ Perluasan dan peningkatan akses jangkauan pelayanan pendidikan.